

**SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH DENGAN MASYARAKAT TERHADAP
KETERSEDIAAN PANGAN SEKTOR BERAS DAN IKAN DI KABUPATEN ROKAN
HULU TAHUN 2016-2018**

Oleh : Desra Afrianti

desraafrianti30@yahoo.co.id

Pembimbing : Dr. Khairul Anwar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293 Telp/Fax.
0761-63277

Abstrac

Food availability in an area has a very important role to fulfill population demand for growth, maintenance and improvement of health status as well as increasing community intelligence. The issue of food availability in the regions is not done by local governments alone, but requires coordination with other stakeholders. This means that there needs to be a synergy between the government and the community. The low regional capacity of Rokan Hulu Regency in providing food for the population and the high dependence on food supply from outside the region, is both a challenge and an opportunity for the community.

The purpose of this study was to determine how the synergy between the local government and the community towards the food availability in the rice and fish sector in Rokan Hulu Regency 2016-2018. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. In collecting data, the writer used interview and documentation techniques.

The results of this study indicate that the fulfillment of food availability in the rice and fish sector in Rokan Hulu Regency 2016-2018 is manifested by a synergy that combines two or more elements to get better output. Synergy is built through communication and coordination by the Rokan Hulu Regency Food and Fisheries Security Service with the community, with the aim of realizing food availability which is a food security sub-system. Insufficient food production to meet food needs is carried out by the market mechanism by the community. The Department of Food Security and Fisheries of Rokan Hulu Regency as a bureaucracy in the concept of bureaucratic performance has met several indicators in measuring bureaucratic performance.

Keywords: Bureaucracy, Society, Communication, Coordination, Food Security

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris, dimana 40% mata pencaharian mayoritas penduduknya bertani atau bercocok tanam.¹ Di Indonesia, pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan.

Kebutuhan pangan merupakan salah satu aspek yang harus dicapai oleh setiap makhluk hidup dengan melakukan usaha agar dapat memenuhi serta mempertahankan keberlangsungan dalam aspek kehidupan.² Karsin mengatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan.³

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 11 Ayat 2, menyatakan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota mempunyai hak untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya di bidang pangan karena pangan termasuk ke dalam urusan pemerintah konkuren yang termasuk kedalam urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 12 Ayat 1-2 yang berbunyi : (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah. Tujuannya agar potensi pangan daerah bisa tergali, sehingga bisa memperkuat ketahanan pangan di daerah.

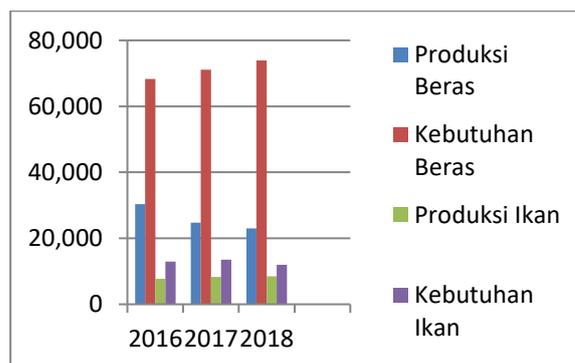
¹ Lailatussuyukriah, "Indonesia dan Konsepsi Negara Agrari", Jurnal Seuneubok Lada, Vol. 2, No.1, Januari - Juni 2015, Program Studi Pendidikan Sejarah, Langsa, Universitas Samudra

² Triwibowo Yuwono, "Pembangunan

Ketersediaan pangan pada suatu wilayah sangat penting peranannya untuk memenuhi permintaan penduduk bagi pertumbuhan, pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan pangan merupakan prioritas utama yang harus dipenuhi.

Perkembangan kebutuhan pangan serta produksi untuk sektor beras dan ikan penduduk Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016-2018 dapat di lihat pada grafik berikut:

Grafik 1.1
Perkembangan Produksi dan Kebutuhan Pangan Sektor Beras dan Ikan Tahun 2016-2018



Sumber :Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu

Sampai dengan tahun 2018 produksi pangan sektor beras dan ikan di Rokan Hulu masih belum mencukupi kebutuhan penduduk. Keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan konsumsi beras dan ikan sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Apabila ketersediaan beras dan ikan lebih besar dari kebutuhan konsumsi beras dan ikan, maka wilayah dikatakan surplus beras dan ikan, sedangkan apabila ketersediaan beras dan ikan lebih

Pertanian: Menuju Kedaulatan Pangan, Yogyakarta, UGM Press, 2011, hal. 1

³ Karsin, , "Peranan Pangan dan Gizi dalam Pembangunan dalam Pengantar Pangan dan Gizi", Jakarta, Penebar Swadaya, 2004

kecil dari kebutuhan konsumsi beras dan ikan, maka wilayah tersebut dikatakan defisit beras dan ikan.

Masih tingginya ketergantungan sumber pangan dari luar daerah merupakan hal yang patut di khawatirkan, karena tidak ada jaminan di sumber produksi pangan tidak ada persolan, dikawatirkan apabila ada gejolak sosial, dan bencana alam di sumber produksi maka ketersediaan pangan daerah pasti akan terganggu dan apabila ketersediaan pangan daerah terganggu maka akan menimbulkan gejolak sosial yang sulit diatasi. Ketergantungan penduduk Rokan Hulu terhadap pemenuhan ketersediaan pangan dari luar daerah, juga akan mempengaruhi pertumbuhan harga pangan setiap tahunnya . Kondisi ini merupakan permasalahan sekaligus tantangan yang berat bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan produksi beras dan perikanan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudi daya ikan serta nelayan dan petani padi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini bahwa hasil produksi masih belum mampu memenuhi kebutuhan beras dan ikan di Kabupaten Rokan Hulu. Dari masalah pokok penelitian tersebut dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang lebih spesifik sebagai berikut: Bagaimana sinergitas pemerintah daerah dengan masyarakat terhadap ketersediaan pangan sektor beras dan ikan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016-2018 ?.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui Sinergitas

Pemerintah Daerah dengan masyarakat terhadap ketersediaan pangan sektor beras dan ikan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2018.

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini di harapkan memiliki manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi mengenai sinergitas pemerintah daerah dengan masyarakat terhadap ketersediaan pangan sektor beras dan ikan di kabupaten rokan hulu tahun 2016-2018
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi semua pihak mengenai peran pemerintah daerah dalam sinergitas pemerintah daerah dengan masyarakat terhadap ketersediaan pangan sektor beras dan ikan di kabupaten rokan hulu tahun 2016-2018

2. Manfaat Akademis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan penelitian ini.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan teori-teori yang terkait dengan masalah penelitian ini.

Tinjauan Pustaka

A. Sinergitas

Najiyati dan Rahmat, mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sofyandi dan

Garniwa mengatakan bahwa sinergitas dapat terbangun melalui komunikasi dan koordinasi.⁴

1. Komunikasi

Menurut Sofyandi dan Garniwa pengertian komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu:

- a. Komunikasi yang berorientasi pada sumber : menyatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang secara sungguh-sungguh memindahkan stimulan guna mendapatkan tanggapan. Dengan melihat unsur kesungguhan dalam komunikasi, maka pengertian itu cenderung berpandangan bahwa semua komunikasi pada dasarnya adalah persuasif.
- b. Pengertian komunikasi yang berorientasi pada penerima : memandang bahwa komunikasi sebagai semua kegiatan di mana seseorang (penerima) menanggapi stimulus. Tegasnya, proses komunikasi menurut pandangan ini berkenaan dengan pemahaman dan arti, karena tekanan diletakkan pada bagaimana penerima melihat dan menafsirkan suatu pesan.

2. Koordinasi

Disamping adanya komunikasi dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi.⁵

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sinergi

merupakan proses kerjasama atau perpaduan elemen untuk dapat menghasilkan sesuatu yang lebih besar dibandingkan dengan bekerja sendiri, dan didalamnya ada pembagian tugas berbagai orang maupun organisasi untuk mengkombinasikan unsur-unsur yang dimiliki oleh masing-masing.

Moekijat menyebutkan ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu :

- 1) Hubungan langsung
- 2) Perencanaan awal
- 3) Keberlanjutan
- 4) Kedinamisan
- 5) Tujuan yang jelas
- 6) Organisasi yang sederhana
- 7) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas
- 8) Komunikasi yang efektif
- 9) Kepemimpinan supervisi yang efektif

B. Birokrasi

1. Pengertian Birokrasi

Menurut Taliziduhu Ndraha pengertian birokrasi (pemerintahan) adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-sub struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan, dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan. Tiga macam pengertian birokrasi yang berkembang saat ini:

2. Konsep Kinerja Birokrasi

Menurut Agus Dwiyanto mengemukakan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu :

1. Produktivitas

dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMPIRO)), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, 2014, hal. 635-641, Universitas Brawijaya, Malang, 2014

⁴ Sofyandi dan Garniwa. 2007. Perilaku Organisasi. Yogyakarta. Graha Ilmu.

⁵ Rahmawati Triana, "Sinergitas Stakeholders

2. Kualitas Layanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas⁶

C. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Menurut Soejono Soekanto masyarakat adalah sekelompok manusia yang secara sengaja dibentuk secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Masyarakat adalah hubungan satu orang/sekelompok orang-orang yang hidup mengelompok maupun individu dan berinteraksi satu sama lain saling pengaruh dan mempengaruhi dan menimbulkan perubahan sosial. Masyarakat juga merupakan wadah untuk membentuk kepribadian diri setiap kelompok manusia atau suku yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Ciri-ciri masyarakat dalam suatu bentuk kehidupan bersama menurut Soejono Soekanto adalah sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama.
Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada yang dapat dikatakan sebagai masyarakat. Akan tetapi secara teoritis, angka minimalnya adalah dua orang yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama.
Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti kursi, dan sebagainya. Oleh karena dengan berkumpulnya manusia,

maka akan timbul manusia-manusia baru lainnya. Manusia itu juga dapat berinteraksi, merasa dan mengerti mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbulah sistem komunikasi dan timbulah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam kelompok tersebut.

- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.⁷

D. Ketahanan Pangan

1. Pengertian Ketahanan Pangan

Pengertian ketahanan pangan menurut Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 yang diperbaharui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Di Indonesia konsep ketahanan pangan dituangkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam definisi tersebut ditegaskan lima bagian dalam konsep tentang ketahanan pangan tersebut, yaitu:

- a. Terpenuhinya pangan yang cukup dari segi jumlah (aspek ketersediaan/ *availability*), yaitu bahwasanya pangan ada dan jumlahnya mencukupi bagi masyarakat, baik yang bersifat nabati maupun hewani.
- b. Terpenuhinya mutu pangan (aspek kesehatan/ *healthy*), yaitu

⁶ Tri Yuningsih, "Kajian Birokrasi", Semarang, Departemen Administrasi Publik Press Universitas Diponegoro, 2019, Hal.100

⁷ Soekanto, Soerjono, "Sosiologi Suatu Pengantar", Jakarta., Rajawali Press, 1986

bahwasanya pangan yang ada atau diadakan memenuhi standar mutu yang baik dan layak untuk dikonsumsi manusia. Kaitannya dalam pemenuhan kebutuhan gizi mencukupi kebutuhan akan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral.

c. Aman (aspek kesehatan/*healthy*), yaitu bahwasanya pangan yang dikonsumsi memenuhi standar kesehatan bagi tubuh dan tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

d. Merata (aspek distribusi/*distribution*), yaitu bahwasanya pangan terjamin untuk distribusi secara merata ke setiap daerah sehingga pangan mudah diperoleh masyarakat.

e. Terjangkau (aspek akses), yaitu bahwasanya pangan memungkinkan untuk diperoleh masyarakat dengan mudah dan harga wajar.⁸

Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan di analisis tanpa menggunakan teknik statistik.⁹

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang dapat diartikan sebagai penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi

ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dkpp) Kabupaten Rokan Hulu, dan masyarakat yaitu petani padi, toke beras dan pembudidaya ikan. Pemilihan lokasi penelitian ini karena ada pertimbangan bahwa ketersediaan pangan di sektor beras dan ikan masih memiliki ketergantungan pasokan dari luar daerah, sedangkan dari segi sumber dayanya, masih sangat bisa di tingkatkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan sektor beras dan ikan di Kabupaten Rokan Hulu.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang diperlukan oleh peneliti adalah :

1. Data Primer, adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).¹¹
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh bukan dari sumber yang pertama, namun sumber kedua, ketiga, dan seterusnya.¹²

4. Sumber Data

1. Informasi Penelitian

Informasi penelitian adalah orang yang menjadi sumber data di dalam penelitian yang berhubungan dengan permasalahan dan mampu memberikan informasi yang akurat kepada peneliti terkait permasalahan penelitian.

2. Media Massa

⁸ Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

⁹ Etta Mamang Sangadji, "Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian", Yogyakarta, C.V Andi offset, 2010. Hal. 171

¹⁰ Narbuko Cholid, "Metodologi Penelitian",

Jakarta, Penerbit Bumi Aksara, 2007, hal. 44

¹¹ Etta Mamang Sangadji, "Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian", 2010, Yogyakarta, C.V Andi Offset, hal. 171.

¹² Etta Mamang Sangadji, ibid hal 171

Media massa merupakan sarana informasi berupa penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas, media massa dalam penelitian ini adalah beberapa media massa cetak yaitu surat kabar dan internet.

3. Dokumen

Dokumen, adalah setiap bahan tertulis atau film. Sumber tertulis dapat terbagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya-jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan.¹³

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, buku, undang-undang, dan sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis data kualitatif. Data yang di peroleh melalui hasil wawancara di dokumen dan bahan-bahan lainnya, kemudian di analisis menggunakan model analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan, dianalisis, dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada, kemudian akan diolah dengan metode deskriptif.

Analisis data kualitatif fokusnya pada penunjukkan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data.

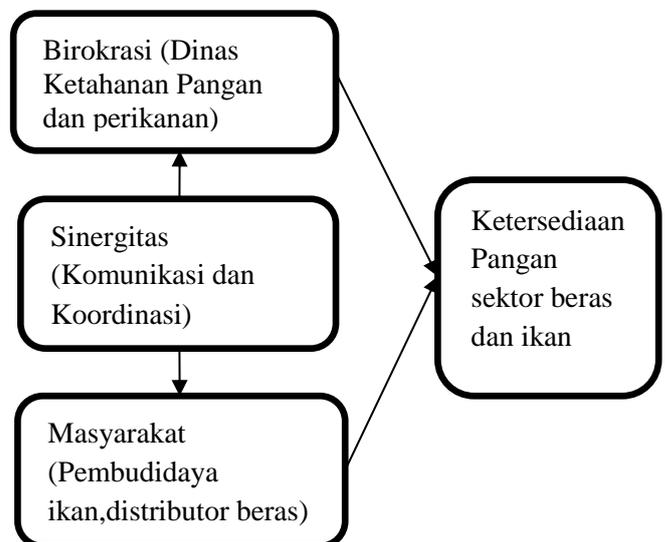
Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Sinergitas Pemerintah Daerah dengan Masyarakat terhadap Ketersediaan Pangan Sektor Beras dan Ikan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2018

Adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat terhadap ketersediaan pangan sektor beras dan ikan di Kabupaten Rokan Hulu tentunya akan meningkatkan kesejahteraan petani padi, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan.

Hal ini dikarenakan persoalan ketersediaan pangan di Kabupaten Rokan Hulu tidak dapat di lakukan sendiri oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang ketahanan pangan dan perikanan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Bagan 3.1
Skema Sinergitas Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Terhadap Ketersediaan Pangan di Kabupaten Rokan Hulu



Dari skema diatas, dapat dilihat bahwa terdapat sinergitas antara

¹³ Siber Silalalahi, "Metodologi Penelitian Sosial", Bandung, Refika Editima, 2010, hal.

pemerintah daerah dengan masyarakat, dimana sinergitas ini dibangun dengan adanya komunikasi dan koordinasi.

Sinergitas yang terdiri dari komunikasi dan koordinasi berada di tengah-tengah pemerintah daerah dengan masyarakat karena dengan adanya sinergitas akan mengkombinasikan perpaduan unsur antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk dapat menghasilkan output yang lebih baik.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan pangan ataupun ketersediaan pangan, sedangkan masyarakat dibutuhkan untuk ikut serta berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pangan. Sinergitas yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat akan menghasilkan terwujudnya ketersediaan pangan di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Fungsi birokrasi di Dinas Ketahanan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu dilihat dari fungsi birokrasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan publik
2. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawas kebijakan (manajemen pemerintahan)
3. Alat pemerintah untuk melayani kepentingan (abdi) masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan

bagian dari kekuatan atau mesin politik (netralitas birokrasi).¹⁴

Menurut Agus Dwiyanto mengemukakan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu :

1. Produktivitas

Hal ini dikarenakan untuk tugas dan fungsi masing-masing pegawai sudah di atur dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu. Dan dalam pelaksanaan pelayanan administrasinya tidak berbelit-belit.

2. Kualitas Layanan

Dinas ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu dalam kualitas pelayanan sudah baik. Untuk pegawai pegawai yang bekerja di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu memiliki sifat yang ramah. Sehingga dalam pelaksanaan layanan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan masyarakat merasakan kualitas pelayanan yang baik.

3. Responsivitas

Dinas ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu dalam hal keselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat sudah cukup baik.¹⁵

3. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018

Ketahanan pangan menurut Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan

¹⁴ Ratnia Solihah, "Modul 1, Pengantar Ilmu Pemerintahan", Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2019

¹⁵ TriYuningsih, "Kajian Birokrasi", Semarang, Departemen Administrasi Publik Press Universitas Diponegoro, 2019, Hal.100

terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil *cut off point* indeks ketahanan pangan tahun 2018 yang di keluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Indonesia menyatakan bahwa Rokan Hulu berada di posisi 9 di tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Riau dan di posisi 342 se-Indonesia berdasarkan IKP kabupaten dengan presentase 57,76% dengan berada di kelompok 3 IKP.¹⁶ Dari hasil *cut off point* indeks ketahanan pangan tahun 2018 memperlihatkan bahwa Kabupaten Rokan Hulu masih berada di kelompok kabupaten yang cenderung memiliki tingkat kerentanan pangan.

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan ketersediaan pangan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, namun membutuhkan sinergi dengan stekholder lainnya. Sinergi adalah mengkombinasikan dua unsur atau lebih untuk mendapatkan output yang lebih baik dan di bangun melalui komunikasi dan koordinasi. Untuk pemenuhan ketersediaan pangan di Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan dengan adanya sinergitas antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Pemerintah daerah yang di maksud adala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu sedangkan yang di maksud dengan masyarakat adalah petani padi, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan. Komunikasi dan koordiansi ini

di realisasiksn melalui orogram dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Pemenuhan ketersediaan pangan sektor beras dan ikan yang masih mengalami ketergantungan pangan di Kabupaten Rokan Hulu dilakukan dengan memasok pangan dari luar dengan adanya mekanisme pasar yang dilakukan oleh masyarakat.

3. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu sebagai birokrasi sudah melaksanakan fungsi dan peran birokrasi yaitu melaksanakan pelayanan publik, manajemen pemerintahan, dan untuk melayani kepentingan masyarakat. Dan sebagai birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu dalam hal kinerja birokrasi sudah memenuhi beberapa indikator untuk mengukur kinerja birokrasi yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas.

4. Indeks ketahanan pangan Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan hasil Cut Off Points indeks ketahanan pangan yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian menyatakan bahwa Kabupaten Rokan Hulu berada pada keompok 3 (tiga) IKP yaitu kelompok yang cenderung memiliki kerentanan pangan.

2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan, mengenai sinergitas pemerintah daerah dengan masyarakat terhadap ketersediaan pangan sektor beras dan ikan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016-2018, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Dearah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu membuat

¹⁶ Badan Ketahanan Pangan, Ibid Hlm 12

program yang menghususkan mengenai pengambilan pasokan pangan dari luar daerah baik itu untuk ketersediaan pangan sektor beras dan ikan di kabupaten Rokan Hulu yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah.

2. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu lebih memaksimalkan Balai Benih Ikan yang di miliki oleh dinas, untuk menambah ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmadi, R. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Hanfie, R. (2010). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Hasan, E. (2005). *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Irianto, G. (2013). *Kedaulatan Lahan dan Pangan, Mimpi atau Nyata*. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementrian Pertanian.
- Karsin. (2004). *Peranan Pangan dan Gizi dalam Pembangunan : Pengantar Pangan dan Gizi*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Narbuko, C. (2007). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pangan, B. K. (2018). *Indeks Ketahanan Pangan 2018*. Jakarta: Kementrian Pertanian.
- Pangan, D. K. (2019). *Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi Tahun 2015-2019*. Jakarta.
- Sangadji, E. M. (2010). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Soekanto, S. (1986). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Solihah, R. (2019). *Modul 1 : Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Statistik, B. P. (2018). *Kabupaten Rokan Hulu dalam Angka Tahun 2018*. Rokan Hulu: BPS.

Sunarminto, B. H. (2014). *Pertanian Terpadu, Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ulber, S. (2010). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Yuningsih, T. (2019). *Kajian Birokrasi*. Semarang: Departemen Administrasi Publik Press, Universitas Diponegoro.

Yuwono, T. (2011). *Pembangunan Pertanian : Menuju Kedaulatan Pangan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.

Jurnal

- A, S., & E, S. (2010). Prospek Beras Dunia 2010: Akankah Kembali Bergejolak. *Jurnal Pangan*.
- Arwansyah, J. (2015, Pekanbaru Universitas Riau). Pembinaan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Kota Pekanbaru terhadap Usaha Kelompok Tani di Kecamatan Rumbai Tahun 2014.
- Dwinugraha, A. P. (Vol. 2, No.1, April 2017). Inergitas Aktor Kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Hendrawati, S. (Vol. 1, No. 2, April 2017 : 101-106 ISSN 1410-5675). Gambaran Konsumsi Ikan pada Keluarga dan Anak Paud RW 07 Desa Cipacing. *Jurnal*

Pengabdian Kepada Masyarakat .

Lailatussyukriah. (Vol. 1, No. 2, 2015 Program Studi Pendidikan Sejarah, Langsa, Universitas Samudra). Indonesia dan Konsepsi Negara Agrari. *Jurnal Seunebok Lada .*

Putri, G. (2014, Pekanbaru, Universitas Riau). Kepentingan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Swasembada Beras di Kabupaten Siak Tahun 2012.

Rahmawati, T. (Vol. 2, No. 4, 2014, Malang, Universitas Brawijaya). Sisnergitas Stekholder dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMPIRO). *Jurnal Administrasi Publik .*

Richky. (Vol. 3, No.2,2016, Pekanbaru, Universitas Riau). Peran Bp4kkp dalam Peningkatan Ketahanan Pangan Sektor Beras di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010-2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Oraganisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Berita Online

Agustian. Mardianto Rico, “Ini Penyebab Rokan Hulu Masih Ketergantungan Pangan Kepada Daerah lain”, Riaumandiri.id, 2017, di akses pada Sabtu 10 Oktober 2020<https://riaumandiri.haluan.co/read/detail/55175/ini-penyebab-rohul-masih-ketergantungan-pangan-kepada-daerah-lain.html>,

Kabupaten Rokan Hulu Negeri Seribu Suluk, “*Sejarah Singkat*”, diakses pada Sabtu 10 Oktober <https://rokanhulukab.go.id/pages/sejarah-singkat>

Riaumandiri.Co, “*Penyaluran Bibit Ikan Ke Warga*”,Kamis 26 Oktober 2016, Diakses Pada Minggu 13 Agsutus 2012, <https://Riaumandiri.Haluan.Co/Read/Detail/43075/Penyaluran-Bantuan-Bibit-Ikan-Ke-Warga.Html>